

Partisipasi Publik Dalam Proses Anggaran Pada Ruang Lingkup Rendahnya Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran di Indonesia

Tri Subekti¹, Budi Supriyatno², Azis Hakim³

^{1,2,3}Magister Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana Jakarta

¹jakartalapdn@gmail.com

Submitted: 20/12/2024; Revised: 17/01/2025; Published: 31/01/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.257>

Abstract

The OBS Budget Transparency Survey is the world's only independent, comparative and fact-based research instrument that uses internationally recognized criteria to assess public access to central government budget information; and the role of budget monitoring institutions, such as legislative bodies and national audit bodies, in the budgeting process. In good government governance, requires accountability, transparency and community participation in every public policy determination, in order to realize good governance. The study related to public participation in the budget process was prepared with the aim of getting an overview of the implementation of public information disclosure in the budgeting process in view of the low level of public participation in the budget process in Indonesia. To achieve this goal, this study uses a qualitative method with a library research approach, namely a method of collecting data by understanding and studying theories from various literature related to the research. Public participation in the Participatory Budgeting process is a key factor. Not everyone wants to be involved in Participatory Budgeting. Some of the reasons that cause low community participation are the community's disappointment because they were not involved in the initial Participatory Budgeting process, Meanwhile, in countries where the level of public participation in Participatory Budgeting is quite high, Factors that encourage community involvement include very high political awareness in society at all levels, involving all levels of society, including minorities and marginalized groups.

Keywords: Public Participation, Budget Process

Abstrak

Survei keterbukaan Anggaran OBS adalah satu-satunya instrumen penelitian independen, komparatif dan berbasis fakta di dunia yang menggunakan kriteria yang diakui secara internasional untuk menilai akses publik atas informasi anggaran pemerintah pusat; kesempatan formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran nasional; dan peran lembaga pengawas anggaran, seperti badan legislatif dan badan audit nasional, dalam proses penganggaran. Dalam tata kelola pemerintah yang baik, mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan public, dalam rangka mewujudkan good governance. Kajian terkait dengan partisipasi publik dalam proses anggaran disusun dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik dalam proses penganggaran ditinjau dari rendahnya partisipasi public dalam proses anggaran di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Partisipasi publik dalam proses Participatory Budgeting memegang factor kunci. Tidak semua orang ingin terlibat dalam Participatory Budgeting. Beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat yaitu adanya kekecewaan

masyarakat karena tidak dilibatkan dalam proses awal Participatory Budgeting, sementara pada negara yang tingkat partisipasi masyarakat dalam Participatory Budgeting cukup tinggi, faktor-faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat diantaranya adalah kesadaran politik masyarakat yang sangat tinggi dalam semua lapisan, melibatkan semua lapisan masyarakat baik masyarakat termasuk kaum minoritas dan termarjinalkan.

Kata Kunci: Partisipasi Publik, Proses Anggaran

Pendahuluan

The Open Budget Survey (OBS) merupakan satu-satunya penilaian komparatif, independen, dan berkala di dunia mengenai transparansi, pengawasan dan partisipasi dalam anggaran Nasional di 120 negara. Seperti yang terjadi pada setiap putaran, survei tahun 2021 mewakili kerja kolektif jaringan peneliti global di setiap Negara dimana dilakukan sesuatu yang berbeda dengan bersandar pada kemitraan dan bekerja sama dengan sekelompok mitra terpilih yang memungkinkan terciptanya wawasan yang kaya dari mitra global dalam memberikan rekomendasi utama untuk mendorong tindakan di tingkat global, regional, dan Negara.

OBS tahun 2021 Indonesia mencatatkan prestasi yang sangat menggembirakan. Dengan perolehan skor 70, Indonesia berhasil menjadi negara dengan peringkat tertinggi di ASEAN dalam hal transparansi anggaran. Dalam konteks global, dengan perolehan nilai tersebut, Indonesia berhasil menduduki peringkat 17 dari 120 negara anggota. Secara peringkat, posisi Indonesia tersebut lebih baik dari peringkat dalam OBS 2019, yaitu peringkat 18 dari 117 negara, dan peringkat 2 di ASEAN (di bawah Filipina). Dit P-APBN, 9 Juni 2022.

Transparansi anggaran penting kaitannya dalam manajemen dan akuntabilitas fiskal, dimana membuka akses seluas-luasnya kepada warga negara tanpa terkecuali, untuk mengakses informasi tentang anggaran yang mereka butuhkan, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan anggaran. Pemerintah juga dapat memiliki gambaran penuh dan akurat atas keuangan negara serta membantu memperkuat kredibilitas rencana fiskal serta mendukung kepercayaan/persepsi pasar atas kebijakan yang diambil. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keputusan anggaran oleh pemerintah, baik pajak apa yang harus dipungut, layanan apa yang harus disediakan, atau berapa banyak utang yang harus diambil,

memiliki konsekuensi penting bagi semua kalangan masyarakat. Ketika pemerintah memberikan informasi dan saluran komunikasi yang berguna bagi publik untuk terlibat dalam keputusan anggaran ini, maka dapat dipastikan kalau uang publik akan dihabiskan untuk kepentingan publik.

Survei keterbukaan Anggaran OBS adalah satu-satunya instrumen penelitian independen, komparatif dan berbasis fakta di dunia yang menggunakan kriteria yang diakui secara internasional untuk menilai akses publik atas informasi anggaran pemerintah pusat; kesempatan formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran nasional; dan peran lembaga pengawas anggaran, seperti badan legislatif dan badan audit nasional, dalam proses penganggaran. Dalam tata kelola pemerintah yang baik, mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan public, dalam rangka mewujudkan good governance.

Good Governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mewujudkannya diperlakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Abdul, 2019).

Selanjutnya menurut Mahmudi (2019) hal perlu diperhatikan adalah siklus pengelolaan keuangan yang merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan dan akuntabel. Kemudian dalam hal transparansi perlu serangkaian atau sejumlah halaman di internet yang memiliki topik saling terkait untuk mempresentasikan suatu informasi. Website merupakan miniatur dan representasi dari perorangan, lembaga, organisasi, ataupun perusahaan yang bersangkutan. Website memberikan informasi, gambaran, serta visualisasi orang/lembaga yang membuatnya. Website bisa dibuat dengan tujuan apa saja, tergantung pemiliknya apapun yang dimimpikan bisa dituangkan dalam bentuk website (Taufik, 2014).

Keterbukaan informasi publik kini menjadi hal yang tak dapat dihindarkan. Perkembangan teknologi, meningkatnya pengetahuan serta capaian demokrasi membuat informasi publik tak lagi berada di ‘ruang sempit’ Apalagi, jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik yang benar, akurat dan bertanggung jawab sudah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan dikuatkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dua payung hukum yang menegaskan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi.

Penjabaran dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi sekaligus bentuk maksimal yang diterapkan negara untuk menjamin hak informasi bagi setiap warga negara. Payung hukum keterbukaan informasi ini kemudian menjadi landasan hukum berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Selain itu juga mempertegas kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi oleh publik. secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan proporsional, serta dengan cara sederhana. Ujung dari adanya keterbukaan informasi publik adalah hadirnya masyarakat informasi yang merupakan visi bersama seluruh bangsa.

Dari uraian di atas dapat dilihat dua situasi atau realitas, yaitu situasi pertama adalah realitas warga negara dalam memenuhi hak dasar informasi yang dibutuhkannya. Situasi kedua adalah realitas Badan Publik dalam menyediakan informasi publik yang berkualitas untuk warga negara. Pada sisi warga negara, realitas dapat dilihat dari partisipasi dan peran serta warga dalam mencari, memperoleh; memiliki, menyimpan, mengelola; dan menyampaikan informasi publik; partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan public dan pengelolaan Badan Publik; serta peran aktif warga dalam pengawasan dan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kajian terkait dengan partisipasi publik dalam proses anggaran disusun dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik dalam proses penganggaran ditinjau dari rendahnya partisipasi public dalam proses anggaran di Indonesia. Gambaran yang dimaksud lebih dari sekadar informasi sejauh mana pemerintah memberikan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya secara transparan.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah dalam suatu tahun anggaran tertentu Abdul (2019). Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut (Mahmudi, 2019).

Transparansi dalam konteks urusan fiskal merupakan indikator penting dari komitmen pemerintah dalam membuka proses pengambilan keputusan internal. Melalui transparansi fiskal informasi tentang anggaran, audit, dan kebijakan keuangan terkait masyarakat dapat menuntut tindakan pemerintah, memberikan tekanan untuk peningkatan kinerja, dan mengevaluasi efektivitas tindakan administratif. Meskipun hanya sedikit masyarakat yang tertarik dan bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki pengetahuan tentang anggaran pemerintah nasional, anggaran tetap merupakan dokumen penting bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis. Dalam negara demokrasi, ada perbedaan antara apa yang menjadi milik negara dan apa yang menjadi milik kedaulatan atau penguasa, sesuatu yang “dipahami di sebagian besar negara demokrasi industri namun tidak dipahami di banyak negara lain yang memiliki dampak buruk pada domain fiskal” (Heald, 2012). Karena anggaran publik didasarkan pada kontribusi keuangan dari warga negara dan aset yang dimiliki publik, warga negara mempunyai hak atas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas anggaran.

Pengertian *Good Governance*

Good Governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mewujudkannya diperlakukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi, dan nepotisme (Abdul, 2019).

Prinsip Dasar *Good Governance* Beberapa prinsip dasar good governance (Abdul, 2019), sebagai berikut:

1. *Public Participation*
2. *Rule of Law*
3. *Transparancy*
4. *Resposiveness*
5. *Consensus Orientation*
6. *Equity*
7. *Effectiviness and Efficiency*
8. *Accountability*
9. *Strategic vision*

Global Indicators of Regulatory Governance (GIRG)

Indeks ini dibuat oleh lembaga di bawah Bank Dunia bernama *Global Indicators of Regulatory Governance (GIRG)*. Indeks ini dibuat untuk melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Akses warga negara ke proses pembuatan peraturan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis di mana investor membuat rencana dan investasi jangka panjang. Tingkat konsultasi yang lebih tinggi juga dikaitkan dengan kualitas regulasi yang lebih tinggi.

Indeks ini lebih berfokus pada bagaimana pemerintah di suatu negara berinteraksi dengan publik saat membentuk peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis. Indeks menyertakan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti asosiasi profesional, kelompok sipil, atau investor asing. Indeks memetakan bagaimana berbagai pemangku kepentingan ini menilai proses pembuatan suatu peraturan dan pelaksanaan mengenai aturan tersebut Indeks juga mengukur sejauh mana transparansi publik dan konsultasi public dijalankan. GIRG juga memasukkan 2 komponen tambahan yakni apakah ada mekanisme apabila warga tidak setuju dengan peraturan dan kemudahan akses berbagai peraturan.

GIRG mengeksplorasi bagaimana pembuat kebijakan berinteraksi dengan pemangku kepentingan saat membuat peraturan yang memengaruhi komunitas bisnis. Indeks ini tidak hanya memberikan informasi tentang kerangka hukum yang memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk terlibat dalam proses pembuatan peraturan, tetapi juga menangkap praktik yang tidak diwajibkan oleh hukum. Tujuan utama dari indeks ini adalah untuk mengukur inklusivitas proses pembuatan peraturan serta mempromosikan praktik peraturan yang baik. Area utama yang dicakup oleh data GIRG termasuk praktik pemberitahuan dan komentar dalam konteks peraturan baru, penerapan penilaian dampak dan transparansi peraturan.

Metode Penelitian

Metode pada kajian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed, 2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Pemecahan Masalah

Pemerintah perlu membuka diri terhadap dialog publik mengenai cara terbaik mengelola sumber daya publik yang langka jika kita ingin mengatasi masalah marginalisasi kelompok tertentu. Hal yang juga perlu dilakukan adalah Inklusi yang menghasilkan keuntungan bagi demokrasi dan pembangunan. Selama 13 tahun terakhir, telah terdokumentasi kemajuan yang stabil dalam transparansi global. Rata-rata skor transparansi dalam beberapa survei meningkat lebih dari 20 persen sejak tahun 2008. Eropa Timur dan Asia Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia serta Afrika Sub-Sahara (setelah penurunan OBS pada tahun 2017) semuanya telah mencapai

kemajuan signifikan dalam skor transparansi regional sejak tahun 2008. Kemajuan ini sangat dibutuhkan karena telah diketahui bahwa keterbukaan fiskal akan menurunkan biaya pinjaman, menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah dapat mengatasi tantangan-tantangan mendesak yang hadapi.

Dalam beberapa survey ditemukan bahwa meskipun sistem akuntabilitas di seluruh dunia masih lemah, factor pandemi tidak membatalkan kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah dalam praktik penganggaran yang transparan dan akuntabel di seluruh dunia. Sebagian besar negara mampu mempertahankan, dan dalam beberapa kasus, melanjutkan kemajuan yang telah dicapai sebelumnya dalam proses anggaran tahunan mereka. Antara tahun 2019 dan 2021, skor rata-rata global untuk transparansi meningkat sebesar 1 poin; skor rata-rata global untuk pengawasan menurun sebesar 1 poin; dan skor rata-rata global untuk partisipasi tidak berubah.

Pada OBS 2021, skor transparansi rata-rata global adalah 45 dari 100, jauh dari tingkat informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk terlibat dalam perdebatan bermakna mengenai bagaimana sumber daya publik dikumpulkan dan dibelanjakan. Hampir tiga perempat negara yang disurvei mendapat skor pada tingkat transparansi anggaran yang tidak memadai. Kurang dari sepertiga negara memberikan informasi yang cukup rinci untuk memahami bagaimana anggaran mereka mengatasi kemiskinan dan hanya 14 % yang menyajikan pengeluaran mereka berdasarkan gender. Partisipasi masyarakat sangat lemah. Anggaran masih menjadi perbincangan para elit dan hanya ada sedikit ruang bagi masyarakat awam untuk terlibat dan menyampaikan pendapat. Skor rata-rata global untuk partisipasi hanya 14 dari 100, yang menunjukkan bahwa partisipasi sangatlah langka dan partisipasi yang berarti sangatlah jarang. Hanya empat negara (Korea Selatan, Inggris, Selandia Baru dan Georgia) yang menawarkan peluang moderat bagi partisipasi masyarakat. Meskipun beberapa negara terlibat dengan masyarakat ketika merumuskan atau menyetujui anggaran, sangat sedikit negara yang melakukan hal tersebut pada tahap implementasi dan pengawasan. Hanya 8 negara di seluruh dunia yang memiliki saluran formal untuk melibatkan masyarakat yang kurang terlayani.

Bagian OBS ini mengukur akses publik atas informasi mengenai bagaimana pemerintah pusat mengumpulkan dan membelanjakan sumber daya publik. Bagian ini

menilai ketersediaan delapan dokumen anggaran utama secara daring, ketepatan waktu, dan kelengkapan menggunakan 109 indikator tertimbang sama dan setiap negara dinilai menggunakan skala 0 hingga 100. Skor transparansi 61 atau lebih tinggi menunjukkan suatu Negara cenderung menerbitkan materi yang cukup untuk mendukung debat public yang terinformasi tentang anggaran. Indonesia memiliki skor transparansi 70 (dari 100) sama dengan tahun sebelumnya, artinya Indonesia tidak mengalami pergeseran kondisi transparansi.

Indonesia telah meningkatkan ketersediaan informasi anggaran dengan cara: Menerbitkan Buku III sebagai bagian dari RAPBN yang meliputi informasi program anggaran di bawah masing-masing kementerian. Menciptakan mekanisme inovatif yang menghubungkan kode QR untuk mengidentifikasi kebutuhan publik untuk Anggaran Masyarakat.

Dalam hal partisipasi publik OBS mengukur peluang formal yang ditawarkan kepada publik untuk bisa berpartisipasi secara berarti dalam berbagai tahap proses anggaran. Pengukuran ini memeriksa praktik eksekutif pemerintah pusat, legislatif, dan lembaga audit tertinggi (BPK) menggunakan 18 indikator berbobot sama, selaras dengan Inisiatif Global untuk Transparansi Fiskal dalam Kebijakan Fiskal dari *Global Initiative for Fiscal Transparency* (GIFT), dan setiap Negara dinilai dalam skala dari 0 hingga 100. Indonesia memiliki skor partisipasi publik 24 (dari 100).

Dalam pelaksanaan pengawasan OBS mengkaji peran yang dimainkan oleh legislatif dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penganggaran dan sejauh mana mereka memberikan pengawasan; setiap negara dinilai pada skala dari 0 hingga 100 berdasarkan 18 indikator tertimbang yang sama. Lembaga legislatif dan lembaga audit tertinggi di Indonesia bersama-sama memberikan pengawasan yang memadai selama proses anggaran, dengan skor pengawasan komposit 61 (dari 100).

Strategi

Dalam hal transparansi Indonesia harus memprioritaskan langkah-langkah berikut untuk meningkatkan transparansi anggaran:

1. Sertakan neraca pemerintah sebagai bagian dari RAPBN dan APBN yang menunjukkan informasi tentang aset finansial dan non-finansial pemerintah di setiap tahun anggaran.
2. Meningkatkan informasi dalam RAPBN dan APBN terkait risiko fiskal, seperti kegiatan kuasi-fiskal perusahaan publik, kewajiban kontingensi, tunggakan, serta analisis keberlanjutan jangka panjang dari keuangan pemerintah.
3. Sertakan informasi pelaksanaan program anggaran secara keuangan dalam Laporan Dalam Tahun dan LKPP.
4. Laporkan perbedaan antara estimasi dan hasil aktual untuk indikator kinerja, seperti hasil data non-finansial, dalam LKPP.

Terkait dengan partisipasi public Kementerian Keuangan Indonesia telah mengadakan Musrenbang selama masa perumusan anggaran serta memiliki mekanisme pengaduan daring selama masa pelaksanaan anggaran. Tetapi, untuk lebih memperkuat partisipasi publik dalam proses anggaran, harus juga memprioritaskan tindakan-tindakan berikut:

1. Memperluas mekanisme selama masa perumusan anggaran di tingkat nasional dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil atau anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi.
2. Secara aktif terlibat dengan komunitas yang rentan dan kurang terwakili, baik secara langsung atau melalui organisasi masyarakat sipil yang mewakili mereka.
3. Mendukung kementerian lain untuk melakukan konsultasi publik tentang anggaran untuk masalah sektoral, seperti kesehatan, pendidikan, atau sektor lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia harus mengedepankan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Izinkan anggota masyarakat atau organisasi masyarakat sipil untuk bersaksi dalam dengar pendapat tentang perencanaan anggaran sebelum disetujui.
2. Izinkan anggota masyarakat atau organisasi masyarakat sipil untuk bersaksi selama dengar pendapat tentang Laporan Audit.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan mekanisme bagi masyarakat untuk membantu mengembangkan program auditnya. BPK harus

memprioritaskan langkah-langkah berikut untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses anggaran menetapkan peluang formal bagi publik untuk berkontribusi pada investigasi audit yang relevan melalui mekanisme-mekanisme seperti Citizen Participatory Audits (Audit Masyarakat)

Selanjutnya dalam hal pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memberikan pengawasan yang memadai selama masa perumusan anggaran dan atasi lemahnya pengawasan selama tahap implementasi. Untuk meningkatkan pengawasan, tindakan berikut diprioritaskan:

1. Komite dalam legislatif harus memeriksa RAPBN dan menerbitkan laporan serta analisis mereka secara daring.
2. Dalam praktiknya, pastikan legislatif dikonsultasikan sebelum eksekutif mengalihkan dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran yang Ditetapkan antara unit-unit administrasi; membelanjakan pendapatan yang tidak terduga; atau mengurangi pengeluaran karena kekurangan pendapatan selama tahun anggaran.
3. Sebuah komite legislatif harus memeriksa Laporan Audit dan menerbitkan laporan dan temuan mereka secara daring.
4. Parlemen harus bekerja untuk mendapatkan kembali kekuasaan anggaran selama proses anggaran tahunan

Kesimpulan

Tuntutan akan transparansi akhir-akhir ini menjadi semakin mendesak, sebagian karena teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru, yang digunakan untuk mendukung inisiatif *e-Government* dan pemerintahan terbuka, telah menjadikan penyebaran informasi semakin memungkinkan. Dikatakan bahwa TIK meningkatkan cakupan dan jangkauan transparansi dengan biaya yang lebih sedikit, dan berpotensi menciptakan peluang baru untuk partisipasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan ulasan tersebut, cukup jelas bahwa tingkat partisipasi publik dalam proses Participatory Budgeting memegang factor kunci. Tidak semua orang ingin terlibat dalam Participatory Budgeting. Beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat yaitu adanya kekecewaan masyarakat karena tidak dilibatkan

dalam proses awal Participatory Budgeting, sementara pada negara yang tingkat partisipasi masyarakat dalam *Participatory Budgeting* cukup tinggi, faktor-faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat diantaranya adalah kesadaran politik masyarakat yang sangat tinggi dalam semua lapisan, melibatkan semua lapisan masyarakat baik masyarakat termasuk kaum minoritas dan termarjinalkan.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. 2001. Metode penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Jakarta: Rajawali Press.
- Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ely Siswanto. 2013. Good University Governance, Prinsip dan Implementasi dalam Penggalan Pendapatan. Malang: Gunung Samudera.
- Halim, Abdul. 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta :UPP STIM YKPN.
- Hasibuah, ZA dan Santoso, HB. 2005. Standarisasi Aplikasi E-Government Untuk Instansi Pemerintah. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi Indonesia. ITB,3-4 Mei 2005.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. Elektronik Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi digital. Yogyakarta: ANDI.
- Irwan taufiq Ritonga dan Syamsul, 2016. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia. Vol.20, No.2. Hal 110-126. Diakses 24 April 2020. <http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Karianga, Hendra. 2017. Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Cimanggis Kencana.
- Luqman Hakim, 2013. Problem Demokratisasi dan Good Governance di Era Reformasi. Jawa Timur: Universitas Brawijaya
- Martani, Dwi, Debby Fitriasari, dan Annisa. 2013. Transparansi Keuangan dan Kinerja pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur& Teknik Sipil. Vol.5. Hal 70-79.
- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Naihasy, Syahrin. 2006. Kebijakan Publik: Menggapai Masyarakat Madani. Yogyakarta: MIDA Pustaka

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019. Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Siregar, Baldric. 2017. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.